

Prostitusi Alexis Marak,

Gembong: Anies Tidak Tegas Beda Zaman Ahok

KAMIS, 01 FEB 2018 12:58 | EDITOR : BINTANG PRADEWO



Hotel Alexis (Dok. JawaPos.com)

Berita Terkait

- Ubah Aturan Ahok, Pengamat: Kebijakan Anies Lebih ke Arah Pencitraan
- PKL Tanah Abang Lebih Senang Kucing-kucingan Dengan Satpol PP

JawaPos.com - Kembali maraknya praktik prostitusi di Hotel Alexis, Jakarta Utara, menjadi pukulan bagi Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno karena pemimpin ibu kota itu tidak bisa memberantas praktik itu secara tuntas.

Berbeda halnya pada saat zaman Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berhasil meratakan Kawasan Kalijodo. Bahkan dia mengubah Kalijodo menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang tegas melakukan penindakan terhadap Hotel Alexis. Dia menganggap Anies-Sandi kecolongan dalam penegakan prostitusi kelas atas itu.



Hotel Alexis (Dok. JawaPos.com)

Tidak lama ini, kata Gembong, Pemprov DKI melalui Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) DKI Jakarta telah melakukan penutupan izin griya pijat di Alexis Hotel. "Pemprov DKI kurang tegas, masa harus terulang lagi dua kali sih," kata Gembong saat dihubungi *JawaPos.com*, Kamis (1/2).

Seharusnya, kata dia, jika kejadian yang sama terulang kembali, Pemprov DKI sebaiknya melakukan pencabutan izin secara menyeluruh. Hal ini lantaran jika perizinan tetap berjalan, kejadian seperti ini akan terus terulang.

Menurut Gembong, Pemprov DKI harus mengambil langkah tegas seperti yang pernah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Kalau dulu yang tidak diperpanjang kan graha pijatnya, sementara hotelnya sendiri tidak ditutup. Harusnya seperti yang dilakukan dulu, Ahok kan tegas pertama dikasih peringatan, yang kedua masih melakukan maka langsung ditutup," ungkapnya.

Menurut pria berbadan kecil ini, Pemprov DKI pun terus melakukan pengawasan meski sebelumnya Hotel Alexis telah diberikan sanksi yakni penutupan izin griya pijat, sehingga kejadian ini terjadi lagi, serta Pemprov DKI bisa langsung dapat mengevaluasi.

"Kuncinya adalah bagaimana Pemprov DKI melalui Disparbud melakukan pengawasan secara berlanjut, sehingga ketika ada penyimpangan sejak dini itu bisa dievaluasi, Pemprov langsung bisa melakukan tindakan," tandasnya.

(ce1/eve/JPC)